

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin. (2021). Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Bone. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 248-255.
- Astuti, R. (2024). Analisis Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Journal of Public Administration Studies*, 144-154.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah. (2024). *Panduan Inventarisasi BMD*. Ngamprah: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Bernas, K. (2024, Januari 11). *Peliknya Permasalahan Aset Daerah, DPD RI Dorong Perubahan Regulasi*. Retrieved from Koran Bernas: <https://koranbernas.id/peliknya-permasalahan-aset-daerah-dpd-ri-dorong-perubahan-regulasi>
- Engkus. (2022). *Kebijakan Publik*. Bekasi: PT KIMSHAFI ALUNG CIPTA.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 33-54.
- Kompas. (2022, Maret 23). *Profil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Aspek Geografi, Demografi, Kebudayaan, dan Potensi Wilayah*. Retrieved from Kompas.com: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/03/23/201348278/profil-provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-aspek-geografi-demografi?page=all>
- krjogja. (2024, Januari 11). *Yogyakarta*. Retrieved from kryogya: <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243721456/senator-diy-ungkap-alasan-ingin-mengubah-undang-undang-aset-daerah-ternyata-ini-penyebabnya>
- Novita, R. (2023). Evaluasi penerapan Permendagri No.19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Aset Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya (JPPISB)*, 103-108.

- Nur, M. J. (2024). Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah Berbasis E-BMD pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 1752-1766.
- Pergub DIY. (2023). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset*. Yogyakarta: Gubernur DIY.
- Permendagri RI. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Permendagri RI. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Poedjiyanto, A. (2020). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 43-51.